

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia, Badan Usaha Milik Negara perlu untuk dijaga kesehatannya oleh pemerintah. Dalam menjaga kondisi tersebut pemerintah menetapkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah penyertaan modal. Tata cara penyertaan modal pemerintah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Tugas dan fungsi penatausahaan Penyertaan Modal oleh pemerintah merupakan konsekuensi kepemilikan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam perkembangan pelaksanaannya mengalami beberapa perubahan atau pergantian instansi/unit yang menanganinya. Hal ini akibat adanya perubahan/pergantian instansi/unit yang melakukan pembinaan BUMN.

Kebijakan pemerintah untuk menyertakan modalnya pada BUMN tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja BUMN. Salah satu kasus adalah pailitnya PT. Merpati Airlines, padahal BUMN ini selalu mendapatkan kucuran modal dari pemerintah setiap tahunnya. Sedangkan pada kasus lainnya, penyertaan modal pemerintah sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada PT. Garuda Indonesia.

Dengan jumlah penyertaan modal negara yang telah mencapai ratusan triliun rupiah, diharapkan berimbang langsung terhadap pertumbuhan aktiva BUMN. Penyertaan modal negara berupa asset tetap pemerintah yang digunakan oleh BUMN secara langsung akan maningkatkan pertumbuhan aktiva tetap, sedangkan penyertaan modal berupa uang dapat digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja sehingga akan meningkatkan juga pertumbuhan aktiva perusahaan dimaksud.

Penyertaan modal pemerintah pada BUMN sering kali tidak menghasilkan *return* yang tidak maksimal pada pendapatan negara. Menurut data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam kurun waktu 2010-2012, setoran BUMN kepada APBN hanya mencapai Rp. 89 triliun sedangkan kucuran dana negara pada kurun waktu yang sama mencapai Rp. 154 triliun sedangkan total penyertaan modal negara sampai dengan Desember 2012 mencapai Rp. 677,3 triliun. Bahkan pada penelitian yang dilakukan oleh M. Syafi'i Idrus dkk (2013) terhadap BUMD di Propinsi Riau, dinyatakan bahwa tambahan penyertaan modal pemerintah daerah tidak akan dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Kontradiksi yang terjadi setelah Penyertaan Modal ini tentu bukanlah tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Penyertaan Modal pada BUMN diharapkan memberikan manfaat terhadap negara dan BUMN itu sendiri. Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah dan BUMN dapat diperoleh dari pertumbuhan aktiva yang tinggi, struktur modal yang optimal dan kinerja keuangan yang baik.

Selain pertumbuhan aktiva, penyertaan modal pemerintah juga akan membantu BUMN dalam menciptakan struktur modal yang ideal bagi perusahaan. Penyertaan modal negara adalah salah satu solusi bagi BUMN untuk menekan biaya modal, sehingga struktur modal BUMN akan optimal. Struktur modal yang optimal ditentukan oleh beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah biaya modal, apabila perusahaan mengeluarkan biaya modal yang tinggi maka mengindikasikan struktur modal yang kurang baik. Menurut Martono dan Harjito (2003) “Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan”.

Selain pertumbuhan aktiva dan struktur modal yang optimal, yang paling diharapkan dari penyertaan modal negara adalah kinerja keuangan yang baik. Beberapa BUMN sukses dalam pengelolaannya ditandai dengan kinerja keuangan yang menggembirakan, pada beberapa BUMN mengalami kerugian bahkan ada yang pailit. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, salah satunya adalah *operating profit margin*. Operating profit margin merupakan rasio yang menggambarkan apa yang biasanya disebut pure profit yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Operating profit disebut murni (pure) dalam pengertian bahwa jumlah tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa pembayaran pajak. Apabila semakin tinggi operating profit margin maka akan semakin baik pula operasi suatu perusahaan.

Dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, hanya terdapat dua BUMN yang secara simultan menerima penyertaan modal setiap tahunnya. BUMN tersebut adalah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Kedua BUMN ini bergerak pada sektor yang sama, dengan tujuan pendirian untuk membantu penjaminan usaha mikro, kecil dan menengah dalam mendapatkan pinjaman dari perbankan. Untuk jumlah penyertaan modal pemerintah Perum Jamkrindo merupakan yang terbesar. Sejak tahun 2007 sampai dengan 2014 Perum Jamkrindo telah menerima sebanyak Rp. 6.539.000.000.000,00 lebih besar dari PT. Askrindo yang berada tepat dibawah Perum Jamkrindo dengan jumlah penyertaan modal pemerintah sebanyak Rp. 5.431.000.000.000,00.

Perum Jamkrindo adalah BUMN yang khusus dibentuk oleh pemerintah untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi UMKMK. Fokus usahanya sendiri saat ini adalah pemberian penjaminan kredit/pembiayaan bank maupun badan usaha lainnya dengan pola konvensional maupun syariah, di mana penjaminan syariah (kafalah) Perum Jamkrindo adalah penjaminan syariah pertama di Indonesia.

Alasan-alasan di atas memberi inspirasi untuk melakukan penelitian tentang “ Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perum Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2006-2014”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Penyertaan Modal Pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan pertumbuhan aktiva sebagai variabel perantara.
2. Apakah Penyertaan Modal Pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel perantara.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan pertumbuhan aktiva sebagai variabel perantara;
- b. Untuk mengetahui pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel perantara.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi akademis

Untuk mengetahui bagaimana proses penyertaan modal pemerintah dan dampak yang dihasilkan. Menambah ilmu dan wawasan, berfikir serta memantapkan ilmu yang telah diperoleh.

b. Bagi praktisi

Sebagai bahan referensi untuk penelitian penyertaan modal pemerintah di masa yang akan datang

c. Bagi penelitian selanjutnya

Untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh penyertaan modal pemerintah terhadap kinerja keuangan BUMN.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian maka diperlukan batasan-batasan sebagai berikut ;

1. Penelitian menggunakan perubahan jumlah aset tetap dari tahun ketahun untuk mengukur tingkat pertumbuhan aktiva perusahaan.
2. Struktur modal diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio*. Rasio ini menggambarkan perbandingan hutang dan ekuitas dalam pendanaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk memenuhi seluruh kewajibannya.
3. Kinerja kuangan diukur dengan menggunakan *Operating Profit Margin*. Rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba setelah beban operasi atau usaha dan harga pokok penjualan dalam hubungannya dengan penjualan yang dilakukan.

## **1.6. Sistematika Laporan**

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan tentang isi yang terkandung dari masing masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Skripsi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian dan pada bagian terakhir dari bab ini yaitu sistem penulisan, diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap bab yang ada dalam skripsi.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan landasan teori, yang berisi jabaran teori-teori dan menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu dalam analisis hasil penelitian. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah skema yang dibuat untuk menjelaskan secara singkat permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis adalah pernyataan yang disimpulkan dari tinjauan pustaka, serta merupakan jawaban sementara atas masalah penelitian.

### **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional dimana diskripsi terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian akan dibahas sekaligus melakukan pendefinisian secara operasional. Penentuan

sampel berisi mengenai masalah yang berkaitan dengan jumlah populasi, jumlah sampel yang diambil dan metode pengambilan sampel. Jenis dan sumber data adalah gambaran tentang jenis data yang digunakan untuk variabel penelitian. Metode analisis mengungkapkan bagaimana gambaran model analisis yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bagian ini menjelaskan tentang diskripsi obyektif objek penelitian yang berisi penjelasan singkat obyek yang digunakan dalam penelitian. Analisis data dan pembahasan hasil penelitian merupakan bentuk yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan meliputi diskripsi objek penelitian, analisis penelitian, serta analisis data dan pembahasan. Hasil penelitian mengungkapkan interpretasi untuk memakai implikasi penelitian.

#### **BAB V Penutup**

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.